

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum struktur masyarakat pedesaan di Indonesia diatur dalam hirarki kekuasaan yang jelas, dengan latar belakang kehidupan yang cenderung bersifat homogen. Baik itu kehomogenan masyarakat desa dapat kita lihat dari segi mata pencaharian, latar belakang pendidikan, maupun taraf kehidupan masyarakat itu sendiri. Komunikasi sosial yang berlaku bersifat vertikal atau menurut Soedjito S, bersifat : " komunikasi sapu lidi ",<sup>11</sup> artinya dalam mensosialisasikan rencana maupun pelaksanaan pembangunan desa setempat berlaku intruksi antara atasan kepada bawahan.

Konsekuensi dari kecendrungan ini menentukan posisi kepala desa sebagai figur sentral dari pelaksanaan pembangunan desa. Soedjito S, dalam bukunya " Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan Pedesaan " mengajukan suatu asumsi bahwa terdapat korelasi yang positif antara eratnya hubungan pimpinan dengan rakyat terhadap pencapaian kebudayaan suatu masyarakat yang sangat tinggi. Dari asumsi tersebut dapatlah ditarik dua kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan menjauhkan pimpinan dari desa, maka terjadi suatu kemunduran yang membangkitkan kesengsaraan, serta kemunduran dalam perkembangan kebudayaan.
2. Dengan jauhnya pimpinan dari masyarakat desa, maka terjadilah kepincangan dalam perkembangan yaitu, tidak ada keseimbangan antara kebudayaan kota dan desa<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soedjito S. Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Industri, Tiara Wacana Jakarta, 1986, hal 43.

<sup>12</sup> Soedjito S. Aspek Sosial-Budaya dalam Pembangunan Pedesaan, Tiara Wacana Jakarta, 1987 hal 17

Demikian kesimpulan ini dikemukakan oleh Soedjito S, yang sekaligus ingin menegaskan bahwa kebudayaan merupakan salah satu indikator bagi penilaian kemajuan serta perkembangan suatu masyarakat yang sedang membangun.

Pembangunan desa yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mempunyai arti strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan desa merupakan pembangunan yang kompleks karena meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama dan pertahanan keamanan. Dalam hal ini, pembangunan desa mengarah pada prinsip keseimbangan, yaitu terjalinnya hubungan yang serasi antara pemerintah dan masyarakat secara seimbang. Pemerintah berperan memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong-royong pada pembangunan tersebut.

Partisipasi dan inisiatif masyarakat merupakan salah satu usaha memajukan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Inisiatif tersebut harus dapat menggugah dan mendorong masyarakat membangun diri dan lingkungannya kearah yang lebih baik.

Untuk memimpin suatu kegiatan diperlukan suatu pimpinan yang mampu mendorong seluruh anggota organisasi tersebut untuk berbuat yang terbaik dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi pemerintah desa, kepala desa merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung-jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan di desa. Kepala desa juga merupakan pejabat pemerintah yang berada di desa yang menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan desa. Dalam UU RI No 5. Tahun 1979 pasal 10 ayat 1 ; mengatakan :

“ Kepala desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung-jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum,